

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Hukum dan Humas

Komentar (Hal.12/HDL)

Senin, 15 April 2013



BPK Minta Pertamina Penuhi Pasokan BBM Nelayan

Manado, KOMENTAR

Dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Pertamina dan BPH Migas dalam menjamin ketersediaan distribusi dan pasokan BBM bersubsidi di daerah ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui anggota IV BPK-RI Ali Masykur Musa mendesak agar jatah BBM bersubsidi untuk nelayan sebaiknya disisihkan tersendiri dan memperoleh prioritas khusus.

"Sebagai daerah propinsi kepulauan dengan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulannya, kebutuhan BBM untuk nelayan di Sulut hendaknya lebih diprioritaskan oleh Pertamina dan BPH Migas. Kehadiran kami disini sekaligus juga memonitoring pelaksanaannya guna menjamin subsidi BBM itu benar benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat," sebut Ali, Jumat pekan lalu.

Menurutnya, dari keseluruhan alokasi BBM Bersubsidi di Propinsi Sulut sebesar 512. 166 kiloliter. Sebagian diantaranya diperuntukan bagi nelayan kecil. Tapi selama tahun 2012 masih sering dijumpai terdapat antrian nelayan



Masih banyak nelayan yang tak bisa menikmati fasilitas dar pemerintah.

untuk mendapatkan solar.

"Jatah BBM Pertamina untuk nelayan hanya 1.000 kiloliter per bulan, ini ternyata masih jauh lebih rendah dari kebutuhan per bulan yang mencapai 2.000 kiloliter. Ini tentu harus mendapat kajian lebih lanjut apalagi daerah Sulut dikenal daerah kaya akan sumber daya perikanan," ujarnya.

Kendati demikian dirinya juga mengingatkan kepada pihak Pertamina agar lebih berhati-hati dalam mengelola pendistribusian BBM bersubsidi agar diakhir tahun nant kuota jangan sampai jebol.

"Distribusi juga harus diperketat, ini untuk menjamin dakhir tahun nanti kuota untuk Sulut jangan sampai jebol. Mengingat realisasi BJT sampai akhir Februari kemarin, penyaluran BBM bersubsidi di Sulut ternyata sudah over kuota hingga 0,77 persen," ungkapnya. [ay]